

tugas Dinas Pendidikan untuk menyiapkan draft perubahan dan draft perbup baru, dan Kemenag perlu juga mengajukan draft perbup sesuai dengan kewenangan daerah dalam pengelolaan pendidikan di daerah.

Agar semua pihak memahami tentang pengelolaan daerah di bidang pendidikan, dan kebijakan-kebijakan yang lahir sejauh ini, di bawah disajikan beberapa peraturan daerah dan peraturan bupati di bidang pendidikan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 07 tahun 2007 tentang sistem penyelenggaraan pendidikan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 07 tahun 2013 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 11 tahun 2013 tentang bebas aksara al Quran pada satuan pendidikan dasar khususnya bagi siswa yang beragama Islam.
4. Peraturan Bupati No. 37 tahun 2001 tentang sistem dan mekanisme pengangkatan/pemberhentian Kepala Sekolah Negeri dan Swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep.
5. Peraturan Bupati Sumenep No. 19 tahun 2005 tentang penugasan guru sebagai kepalah sekolah.
6. Peraturan Bupati Sumenep No. 19 tahun 2009 tentang mekanisme penugasan guru sebagai kepalah sekolah.
7. Peraturan Bupati Sumenep No. 29 tahun 2009 tentang tugas dan fungsi pengawas sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep.

tengah arus kebudayaan global yang terus menggempur sendi-sendi kehidupan masyarakat, terutama masyarakat Sumenep, sehingga menjadi sangat urgen untuk diperkuat melalui pendidikan yang kuat. Masyarakat berkarakter kuat adalah masyarakat yang memiliki akhlak, moral, dan budi pekerti yang baik, memiliki kepribadian, kemandirian, keyakinan diri dan disiplin yang tinggi. Selain itu, masyarakat yang berkarakter juga memiliki semangat yang tinggi, selalu optimis, berfikir positif, ulet, tegar, gigih dalam mengatasi masalah, memiliki toleransi yang tinggi terhadap perbedaan serta mampu menghargai pihak lain sesama bangsa Indonesia.

Kedua, masalah bagaimana membangun masyarakat yang berpengetahuan untuk meningkatkan basis pengetahuan masyarakat. Hal itu diperlukan agar masyarakat Sumenep bisa terlibat secara aktif dalam kehidupan ekonomi kehidupan politik, kehidupan sosial dan hubungan internasional oleh karena itu, peningkatan basis pengetahuan, membutuhkan kerja keras untuk diwujudkan dalam semua elemen kehidupan masyarakat, baik masyarakat yang ada di perkotaan, pedalaman, dan bahkan pelosok desa. Sehingga peningkatan pengetahuan tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan saja melainkan juga dapat merata terjadi di seluruh kehidupan masyarakat.

Ketiga, tantangan dalam membangun budaya inovasi, yang sangat dibutuhkan dalam membangun bangsa menjadi negara yang maju sesuai dengan tuntutan abad ke-21 budaya inovasi, secara substansial menjadi sesuatu yang urgen untuk dibangun dalam kehidupan bangsa Indonesia, khususnya di Kabupaten Sumenep. Budaya inovasi merupakan jalan untuk

memecahkan setiap persoalan yang terjadi dan bisa meningkatkan taraf hidup serta produktivitas perekonomian tentu harus ditopang pendidikan.

Kesadaran dalam membangun pendidikan tersebut, pada dasarnya tidak hanya sekedar membangun pendidikan *an sich*, melainkan juga telah membangun aspek lain yang terkait. Karena pembangunan pendidikan, secara substansial merupakan bagian dari proses pembangunan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.¹¹ Intinya, pendidikan adalah jantung kehidupan yang menjadi penentu terhadap kemajuan sektor yang lain, termasuk pengelolaan dan pengembangan pendidikan di Kabupaten Sumenep.

Secara khusus dalam konteks Kabupaten Sumenep, kondisi pendidikan tentu saja bisa berbeda dengan daerah yang lain. Selain karena tingkat SDM pengelola pendidikan persoalan geografis juga menjadi salah satu problem dalam pengelolaan pendidikan di Kabupaten Sumenep yang menuntut untuk dicarikan solusi baiknya, sehingga dibutuhkan pemikiran kreatif dalam mendorong dan meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Sumenep. Walaupun, harus disadari bahwa pengelolaan pendidikan, sejatinya merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya negara (pemerintah), melainkan segenap unsur dan elemen masyarakat, pada dasarnya kita memiliki amanah yang sama dalam memperjuangkan kemajuan pendidikan.

Pemerintah daerah, tidak bisa dijadikan sebagai pelaku tunggal dalam

¹¹ Sentralnya pendidikan dalam peningkatan kualitas SDM, sehingga pendidikan menjadi alur tengah pembangunan dari seluruh sektor pembangunan. Ada persepsi masyarakat pembangunan lebih menjurus pada pembangunan fisik. Padahal sukses tidaknya pembangunan fisik justru sangat ditentukan oleh keberhasilan pembangunan spiritual/rohani yang secara utuh disebut pembangunan manusia yang menjadi tugas utama pendidikan. Lihat Umar Tirta Rahardja dan S.L. La Sulo, *Pengantar Pendidikan* (Jakarta: PT. Renika Cipta), 300.

gerakan membangun pendidikan yang ideal di Sumenep, melainkan perlu ada kesadaran bersama bahwa pendidikan merupakan urusan bersama yang harus dipikirkan untuk selalu dikembangkan, diawasi dan dinikmati bersama oleh segenap lapisan masyarakat.

Disinilah makna partisipasi dari *stakeholder* pendidikan memiliki keterkaitan yang sangat erat dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengorientasikan arah pembangunan pendidikan kearah yang jelas, yaitu menciptakan pendidikan yang benar-benar bermakna dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat Sumenep. Komitmen untuk membangun pendidikan yang maju dan berkeadilan ini, sudah menjadi bagian dari garis perjuangan yang sangat prioritas, karena tanpa kemajuan pendidikan, sulit bagi Kabupaten Sumenep untuk meningkatkan kapasitas SDM sebagai penopang pembangunan secara keseluruhan. Sebab, kemajuan suatu daerah, akan tercipta apabila ditopang dengan kualitas SDM yang maju dan SDM menjadi berkembang pesat, apabila ditopang oleh menyelenggarakan pendidikan dengan usaha yang maksimal.¹²

Upaya peningkatan mutu pendidikan yang mengedepankan kualitas tidak hanya kuantitas adalah suatu progress yang harus dijadikan pijakan awal dalam penataan pendidikan yang berorientasi pada perbaikan menuju kemajuan dan pendidikan sesungguhnya tidak hanya menjadi tanggung jawab

¹² Abuya Busyro Karim, *Ijtihad Pendidikan; catatan pemikiran dan Solusi dalam Membangun Sumenep 2010-2015* (Surabaya: Muara Progresif, 2015), 71-73.

pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah dan masukan masyarakat sehingga mau tidak mau pemerintah Kabupaten Sumenep harus segera mengambil inisiatif untuk merumuskan SPM (Standart Pelayanan Minimal) bidang pendidikan, termasuk didalamnya arah dan strategi pembangunan bidang pendidikan yang berkualitas, terencana dan benar-benar memperhatikan serta memperjuangkan kepentingan terbaik peserta didik.¹³

Pengembangan pendidikan ini, sejatinya telah menjadi bagian penting dari komitmen untuk dibangun dengan secara bersama dengan usaha yang maksimal, sehingga bisa menjadi kekuatan dalam peningkatkan kapasitas SDM masyarakat Sumenep. Karena untuk menjadi kabupaten yang maju dan berperadaban, tidak mungkin, keberadaan pendidikan hanya dikelola dengan semangat setengah hati. Membangun pendidikan yang maju, membutuhkan komitmen dan kemauan yang kuat serta keikhlasan yang mendalam, terutama dalam membangun pendidikan masyarakat yang berada yang berada di pelosok pedesaan baik wilayah daratan dan wilayah kepulauan. Semua itu masih membutuhkan pemikiran yang keras dan cerdas untuk dicarikan solusinya, sehingga pendidikan yang dikembangkan di Sumenep bisa dilakukan secara merata dan berkeadilan. Pendidikan Sumenep pada gilirannya bisa menjadi jalan pembuka untuk mengukir prestasi kembali pada masa-masa emas kemajuan pendidikan dan Madura tempo dulu yang pernah

¹³ Tim Penyusun Perumusan dan penyusunan standart pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan kabupaten Sumenep, Kerjasama pemkab Sumenep dengan LPPM Universitas Airlangga tahun 2006, 1.

Fenomena berdirinya SMA dan SMK Sawasta berbasis pesantren, karena yang berkembang lembaga yang sebelumnya adalah MTs dan MA, namun yang terjadi ahir-ahir ini, para pimpinan lembaga pendidikan berubah haluan dengan mendirikan SMA atau SMK yang notabeni berafiliasi dengan kementerian pendidikan yang sekarang di bawah naungan kementerian pendidikan dasar dan menengah (KemendikDasmen). Tentu menjadi hal menarik untuk terus dikaji dan diteliti secara ilmiah dengan melakukan analisa yang komperhensif.

Melihat data lembaga pendidikan tahun 2010-2011, peningkatan jumlah lembaga pendidikan Sumenep, sudah sangat terasa, *pertama*, perkembangan jumlah TK mencapai 372 (2 TK Negeri dan 370 TK Swasta) dengan jumlah murid mencapai 14.399 orang anak. Jumlah guru mencapai 1.483 guru. Jumlah ruang kelas untuk RA mencapai 979 buah. Jumlah lulusan mencapai 6.408 orang, *kedua*, jumlah SD dan MI. berdasarkan data yang ada (tahun 2010-2011), jumlah siswa SD dan MI mencapai 116.076 dengan jumlah ruang kelas milik mencapai sebanyak 6.571 buah, sedangkan ruang kelas bukan milik sebanyak di SD 140 ruang. Adapun jumlah guru yang menjadi tenaga pengajar di SD dan MI sebanyak 13.759 orang. *Ketiga*, tingkat SLTP (SMP dan M.Ts). Berdasarkan data tahun yang sama, jumlah SMP dan MTs mencapai 303 buah dengan jumlah siswa seluruhnya mencapai 44.446. Jumlah ruang kelas sebanyak 1.485 ruang. Tenaga pengajar baik SMP dan MTs mencapai 5.825 orang. *Keempat*, tingkat SM (SMA/SMK, MA dan MAK).

Secara khusus wilayah Sumenep, terutama daerah pedesaan dan berbagai wilayah daratan dan kepulauan, masih tidak bisa dielakkan hal yang terjadi pada anak-anak yang berada di bawah umur atau dengan kata lain masih usia sekolah, kerap kali dipaksa untuk bekerja di rumah membantu pekerjaan orang tua diberbagai sektor, baik sektor pertanian, perkebunan, industri kecil, pekerjaan lain yang bisa membantu peningkatan ekonomi orang tua.¹⁶ Jam kerja yang panjang, kelelahan fisik dan lain sebagainya, bahkan ditambah lagi dengan pengaruh lingkungan yang memang memiliki kesadaran terhadap pendidikan, menjadi faktor penentu yang menyebabkan anak-anak usia sekolah di wilayah Kabupaten Sumenep harus menekuni pekerjaan yang belum waktunya dilakukan. Dampak dari kondisi ini adalah banyak anak-anak yang tidak memiliki presentasi positif di sekolah.

Kondisi itu, setidaknya menjadi gambaran tentang kondisi masyarakat sekitar tahun 2010-an, tetapi sampai hari ini pun kondisi yang sama, masih tidak menutup kemungkinan juga masih terjadi karena pendidikan pada dasarnya berkaitan erat dengan kesadaran dan tingkat pendidikan masyarakat, maka kesadaran terhadap dunia pendidikan akan jauh lebih besar daripada masyarakat yang memang memiliki kesadaran yang dangkal dalam memahami tentang signifikansi pengembangan pendidikan yang harus dilakukan.

¹⁶ Orang tua adalah pendidik pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak awalnya menerima pendidikan. Sehingga tidak salah bahwa bentuk pertama pendidikan adalah dari kehidupan keluarga. Lihat Zakiah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: PT. Bumi Akasra, Cet. XIV, 2014), 35.

Komitmen dalam upaya menata pendidikan, melalui pembangunan yang berorientasi pada cita-cita mewujudkan masyarakat Sumenep yang beradab dan berkeadaban, akan selalu terus dibangun dengan berpijak pada kesadaran bahwa peningkatan mutu pendidikan harus dibangun bersama masyarakat Kabupaten Sumenep karena pemerintah pada hakikatnya hanya bagian dari elemen sosial yang harus menggerakkan pembangunan pendidikan di Kabupaten Sumenep oleh karena itu, penataan pendidikan, terutama keberadaan lembaga pendidikan dasar negeri yang dianggap kurang produktif terus dicarikan solusinya, mulai dengan cara melahirkan kebijakan baru yang inovatif sampai pada terakhir, yaitu produktivitas pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Sumenep bisa terus dilakukan lembaga pendidikan negeri yang mati suri, tidak bisa dibiarkan karena hanya akan menjadi beban terhadap pemerintah dan dukungan penuh dari berbagai lapisan masyarakat, sehingga perlu dilakukan kebijakan-kebijakan yang sangat radikal. Tujuannya tentu saja agar pendidikan di Kabupaten Sumenep bisa berjalan dengan dinamis, kreatif dan berorientasi pada upaya mencerdaskan manusia seutuhnya dalam upaya memajukan bangsa kita tercinta dengan terus melakukan pembenahan melalui kebijakan pendidikan dari pemangku kebijakan.

Salah satu upaya efektivitas dan efisiensi oleh pemerintah Kabupaten Sumenep adalah kebijakan *regrouping* dan penutupan terhadap sejumlah lembaga pendidikan telah dilakukan sejak tahun 2012 oleh pemerintah Kabupaten Sumenep sebagai bagian dari ikhtiar dalam melakukan penataan terhadap pendidikan di Kabupaten Sumenep. Berdasarkan data yang ada,

ketertinggalan yang masih ada. Tanpa pengembangan SDM arah pendidikan Kabupaten Sumenep tidak akan berjalan ke satu titik, yaitu menghasilkan pendidikan yang bisa memberikan makna terhadap pengembangan dan kemajuan masyarakat Sumenep. Bahkan, keberhasilan program dan kegiatan yang telah diagendakan, sangat ditentukan oleh kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki, sehingga dibutuhkan suatu strategi pengembangan SDM yang baik dengan menggunakan berbagai alternatif atau kemungkinan yang akan terjadi.¹⁸

Usaha dalam mengembangkan SDM pendidikan adalah bagian dari proses investasi masa depan bagi kemajuan pendidikan Sumenep yang harus dilakukan sejak dini. Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan harus dikelola dan dikembangkan secara professional secara utuh dan menyeluruh dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sehingga bisa menjadi kekuatan yang prima dalam membangun pondasi pendidikan Sumenep yang berorientasi terhadap masa depan dengan peningkatan SDM yang lebih berkualitas dengan tidak meninggalkan kearifan lokal.

Hal ini seperti diungkapkan oleh Suryadi Tilaar bahwa kemampuan guru, kepala sekolah penilik/pengawas, para pengelola pendidikan dan tenaga kependidikan lainnya ialah kekuatan sumber daya pendidikan harus mampu melaksanakan tugas-tugasnya, baik oleh pemerintah pusat maupun

¹⁸ Irwan Abdullah, *‘Pemberdayaan Masyarakat yang lemah dan tertinggal’*, dalam tukiran, et.al, *sumber daya manusia tantangan dan masa depan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar- PSKK UGM, 2007), 23.

3. Mengakhiri Tradisi Jabatan Seumur Hidup

Salah satu dari berbagai problem pendidikan yang terjadi di Sumenep satu hal yang cukup mengemuka selama ini masih belum terlupakan dalam masalah kepemimpinan sekolah, terletak pada jabatan kepala sekolah yang cenderung tidak terbatas, terutama di Kabupaten Sumenep.²⁰ Posisi kepala sekolah, sejak dulu masih dianggap sebagai wilayah yang nyaris tidak bisa disentuh, sehingga tidak heran, apabila terdapat individu yang menjabat sebagai kepala sekolah dalam waktu yang sangat lama, tanpa bisa diganti dengan yang lain. Akibatnya, kondisi tersebut dianggap sebagai fenomena “*status quo*” yang terbiarkan berjalan dalam dunia pendidikan.

Kondisi ini disadari ataupun tidak, fenomena tersebut akan berdampak kurang baik terhadap regenerasi kepemimpinan pendidikan, karena mengesankan telah terjadi pelanggaran kekuasaan segelintir orang terhadap kepemimpinan sekolah. Padahal, kepemimpinan yang ideal adalah kepemimpinan yang dibatasi oleh jangka waktu, karena dari sana akan muncul dinamika dan penyegaran orientasi terhadap kepemimpinan sekolah. Kebijakan periodisasi diarahkan untuk menciptakan kelancaran dalam konteks regenerasi kepemimpinan sekolah serta memutus jabatan

²⁰ Peraturan Bupati Sumenep No. 12 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 tahun 2012, tentang pedoman pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Dari Perbub ini di atur jabatan kepala sekolah adalah maksimal 12 tahun, kebijakan ini untuk memberikan dinamika kepemimpinan yang progress demi perbaikan pendidikan dan regenerasi kepemimpinan.

kepala sekolah seumur hidup, karena kepemimpinan sekolah harus hidup hanya dan terus membuka peluang tidak adanya penyegaran kepemimpinan sekolah, sehingga bisa membuat sekolah menjadi tidak dinamis.

Seorang Bupati sebagai pemegang kebijakan melihat kondisi itu harus segera diakhiri seorang kepala sekolah tidak harus menjabat sebagai kepala sekolah selamanya, tanpa memberikan kesempatan kepada potensi lain yang ada salah satu kebijakan yang dilakukan adalah memberikan batasan waktu terhadap jabatan kepala sekolah dengan cara menerapkan kebijakan pereodisasi, yang pada gilirannya akan berdampak terhadap perkembangan kepemimpinan di sekolah. Karena kepala sekolah merupakan *leader* yang menentukan hal dilakukan demi tercapainya kemajuan yang dicapai sesuai target dan visi misi sekolah, maka kebijakan pereodisasi ini dapat menjadi momentum yang tepat dalam melakukan regenerasi kepemimpinan di sekolah.

Periodisasi kepala sekolah yang diterapkan di Sumenep pada tahun 2012, harus dimaknai sebagai terobosan yang positif untuk mendorong kemajuan sekolah yang dipimpinnya. Terdapat beberapa kepala sekolah. *Pertama*, kepala sekolah sebagai edukator, yang diberi tugas untuk melaksanakan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. *Kedua*, kepala sekolah sebagai manajer, yang memiliki tugas untuk menyusun, merencanakan, mengorganisasi kegiatan, mengarahkan kegiatan, melaksanakan, pengawasan serta melakukan evaluasi terhadap kegiatan.

Ketiga, kepala sekolah sebagai administrator, yang memiliki tugas menyelenggarakan administrasi, mulai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengordinasian, *keempat*, kepala sekolah sebagai supervisor,²¹ yang memiliki tugas menyelenggarakan supervisi mengenai beberapa hal, yaitu proses belajar mengajar, kegiatan bimbingan dan konseling kegiatan ekstrakurikuler, kerjasama dengan masyarakat dan instansi terkait. *Kelima*, kepala sekolah sebagai pemimpin yang harus memiliki sifat-sifat luhur, seperti dapat dipercaya, amanah, bertanggung jawab, harus memiliki kemampuan menggali berbagai potensi yang dimiliki sekolah untuk kemajuan sekolah kearah yang jelas. Hal ini penting agar terjadi pola kepemimpinan vareatif sehingga kepemimpinan kepala sekolah yang baik dan punya prestasi dapat menjadi *pilot project* bagi sekolah atau madrasah lainnya.

Kebijakan periodesasi ini, merupakan terobosan positif dalam merombak tradisi lama yang kurang baik dalam kepemimpinan sekolah di Kabupaten Sumenep. Hal itu menjadi penting karena kualitas pendidikan akan berkembang dengan pesat, apabila pemimpin sekolah juga terdiri dari individu yang memiliki pemikiran progresif dan konstruktif dalam membangun sekolah. Dengan periodesasi, maka stigma ‘raja-raja kecil’ di lembaga pendidikan telah mulai diruntuhkan. Kepala sekolah yang masa jabatannya telah mencapai di atas 12 tahun, harus segera dilakukan

²¹ Eksekutor supervisi di lapangan adalah kepala Sekolah, Penilik dan Pengawas. Mereka adalah supervisor yang bertanggung jawab terhadap eksistensi dan dinamika lembaga pendidikan yang diharapkan mampu membangkitkan potensi bangsa di masa depan. Lihat Jamal Ma'mur Asmani, *Tips Efektif Supervisi Pendidikan Sekolah* (Yogyakarta: Diva Press, 2012), 51.

regenerasi kepemimpinan melalui kebijakan perodesasi yang terus berjalan dinamis, tanpa pandang bulu, langkah itu dilakukan semata-mata untuk mendorong terciptanya proses seleksi kepemimpinan sekolah yang lebih kredibel dan berkeadilan sesuai kredibilitas dan kemampuan manajerial yang dimilikinya.

D. Layanan Pendidikan: dari fasilitas sampai kesejahteraan

Layanan terhadap birokrasi pemerintahan pada masyarakat menjadi substansi dari birokrasi pemerintahan. Pemerintahan, pada dasarnya adalah pelayanan masyarakat yang diberi tugas untuk memberikan yang terbaik terhadap kepentingan masyarakat, termasuk juga dalam masalah layanan pendidikan yang sangat kompleks. Pemerintah sebagai pemegang kebijakan dalam melaksanakan pendidikan memiliki tanggung jawab yang besar untuk memberikan layanan yang maksimal dalam proses pelaksanaan pendidikan. Tanpa layanan yang baik, pelaksanaan pendidikan yang notabene melibatkan masyarakat banyak, tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Padahal, dunia pendidikan merupakan aspek yang lebih banyak bersentuhan dengan masyarakat yang begitu beragam pemahaman yang berbeda-beda tingkatan.

Konteks pembenahan layanan pendidikan tersebut, adalah suatu komitmen yakni berusaha dengan berbagai cara dan upaya dilakukan, guna mendorong terciptanya pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan target yang ingin dicapai, antara lain :

1. Peningkatan Sarpras Pendidikan

Dukungan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, proses pelaksanaan pendidikan mustahil akan berjalan dengan normal, sarpras memang bukan segala-galanya, tetapi menjadi salah satu elemen yang bisa menentukan dalam menghasilkan produk pendidikan, terutama sarpras yang berkaitan dengan fasilitas proses KBM (kegiatan belajar mengajar), dengan fasilitas pendidikan yang merata, sejatinya masa depan pendidikan Sumenep akan terjamin, walaupun memang tidak seratus persen maksimal bisa diwujudkan. Namun dengan berbagai komitmen berupa usaha dan tahapan menuju perbaikan yang terus berkelanjutan.

Usaha selama waktu lima tahun terakhir (antara tahun 2011-2015) upaya meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Sumenep terus dimaksimalkan. Berbagai upaya terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik peningkatan fasilitas perpustakaan, laboratorium, bangunan ruang kelas baru (RKB), rehabilitasi ruang kelas, alat peraga, pengadaan komputer administrasi, pengadaan TIK dan berbagai fasilitas olah raga serta seni. Semua itu menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk diperjuangkan, karena pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas akan memberikan dukungan yang besar terhadap proses belajar mengajar. Bahkan, dalam rangka memberikan layanan pendidikan yang memuaskan, pemerintah daerah pada tahun 2014 telah mengalokasikan anggaran dari APBD sebesar Rp. 3,5 miliar untuk

pembangunan gedung kantor dinas pendidikan yang baru yang lebih representative dari segi kualitas.

Keberadaan Kantor Dinas pendidikan yang baru ini nantinya diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi masyarakat dan para pegawai struktur di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep. Keberhasilan membangun gedung baru Dinas Pendidikan ini, tentu saja merupakan keberhasilan yang tidak bisa dilukiskan, karena dengan gedung baru Dinas Pendidikan, pada gilirannya harus diimbangi dengan komitmen yang baru dalam mengelola dan mengembangkan serta memajukan pendidikan di Kabupaten Sumenep.

Kelengkapan fasilitas pendidikan, disatu sisi merupakan bentuk nyata dari upaya meningkatkan layanan pendidikan yang memang menjadi bagian dari visi sebagai bupati, karena tanpa peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, layanan pendidikan sarana dan prasarana tidak akan berjalan dengan normal. Untuk mewujudkan hal itu Bupati selalu mendorong agar kepada Dinas Pendidikan termasuk kepala kemenrian agama setempat agar terus melakukan perbaikan dan inovasi yang kreatif dan solutif dalam mengejar ketertinggalan dalam memenuhi kebutuhan fasilitas pendidikn di Kabupaten Sumenep, sehingga kondisi sarpras yang dibutuhkan oleh sekolah, baik SD, SMP dan SMA bisa terpenuhi dengan baik.

2. Bantuan Motor bagi Tenaga Pengawas

Keberadaan peran pengawas sekolah dalam proses monitoring dan supervisi pendidikan menjadi vital, karena pengawas bukan hanya strategis dalam mengawal proses pelaksanaan pendidikan yang dilaksanakan di setiap sekolah, baik SD, SMP maupun SMA. Pengawas pada dasarnya merupakan kepanjangan tangan Dinas Pendidikan untuk melakukan kontrol dan evaluasi terhadap proses pendidikan yang dilakukan di sekolah. Baik dan buruknya perkembangan pendidikan yang dilakukan oleh sekolah, tetap tidak bisa dilepaskan dari peran aktif pengawas dalam melaksanakan tugas. Pengawas memiliki tugas suci untuk melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* dalam pelaksanaan pendidikan.

Mencermati urgennya posisi pengawas tersebut, keberadaan pengawas tidak bisa dianaktirikan dalam pendidikan dengan seperangkat tugas yang sangat berat. Atas dasar pemikiran keberadaan pengawas yang sangat strategis tersebut, pemerintah daerah, pada tahun 2014 menyediakan anggaran yang cukup untuk memaksimalkan fungsi pengawasan yang diemban oleh para pengawas. Pemerintah daerah menyediakan fasilitas kendaraan roda dua untuk setiap pengawas, terutama untuk jenjang pendidikan TK/SD.

Implementasi kebijakan ini bertepatan pada 29 bulan Desember 2014, berupa bantuan sepeda motor yang diberikan kepada pengawas sebanyak 76 unit dan 7 unit diberikan kepada Kasubag di lingkungan Disdik dan 27 unit diberikan kepada UPT di lingkungan dinas pendidikan Kabupaten

Sumenep. Untuk menyediakan bantuan kendaraan Dinas tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 1.595.000.000 dari APBD Kabupaten Sumenep tahun 2014.

3. BPPGDS: Upaya Membela Nasib Guru Swata dan Santri

BPPDGS (Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Guru Diniyah dan Guru Swasta) merupakan salah satu upaya yang dilakukan yang selama terabaikan oleh pemerintah daerah untuk memberikan perhatian terhadap kesejahteraan kalangan guru diniyah dan swasta di lingkungan pendidikan Kabupaten Sumenep baik yang ada di bawah Kementerian Agama (Kemenag) maupun Dinas Pendidikan (Disdik).

Jumlah guru swasta di Kabupaten Sumenep yang cukup besar²² di satu sisi Sumenep, tetapi sekaligus menjadi beban pemerintah untuk dipikirkan kesejahteraannya. Karena bagaimanapun, keberadaan guru swasta tidak bisa dinafikan. Mereka dengan tekun dan tanpa pamrih memiliki komitmen yang sama untuk mencerdaskan kehidupan anak Sumenep melalui lembaga pendidikan yang menjadi tempat mengabdikan. Pemerintah tentu saja tidak bisa mengabaikan peran dan perjuangan mereka dalam bidang pendidikan, juga harus mampu mengakomodasi kepentingan guru swasta, terutama dalam aspek kesejahteraannya. Kebijakan MPPDGS ini dapat dikategorikan menjadi beberapa macam.

²² Jumlah tersebut digambarkan dalam buku *Sumenep dalam Angka 2014*, antara lain untuk guru swasta TK mencapai 1.392 orang, SD mencapai 475 orang, SMP mencapai 1.241, SMA mencapai 837, SMK mencapai 492, guru RA mencapai 17.695, MI mencapai 46.594, M.Ts mencapai 32.637, MA berjumlah 19.759 dan guru MD mencapai 108.508 orang.

Pertama, bantuan untuk santri (warga belajar). Bantuan ini merupakan wujud kepedulian pemerintah dalam memberikan apresiasi terhadap kalangan santri yang menekuni keilmuan I jenjang Madrasah diniyah (Madin) Ula dan Madin Wustho²³ serta warga belajar paket A dan B. Sebab, tiga elemen pendidikan ini secara substansial juga merupakan bagian dari pendidikan Kabupaten Sumenep yang keberadaannya sangat bermakna dalam proses pengembangan sumber daya manusia masyarakat Sumenep.

Sejak 2011-2014, pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk program ini, yang mencapai Rp. 1.437.750.000, dengan rincian bahwa untuk tahun 2011 mencapai Rp. 10.370.450.000, tahun 2012 sebesar Rp. 8.100.000.000, tahun 2013 sebesar Rp. 6.390.000.000, dan tahun 2014 mencapai Rp. 170.000.000.

Kedua, bantuan untuk pengasuh (*ustadz*). Dengan bantuan ini, kalangan pengasuh pesantren dan lembaga pendidikan agama, minimal bisa mendapatkan tunjangan kesejahteraan, sehingga bisa bermanfaat dalam melaksanakan tugas suci sebagai pendidik, terutama dalam bidang pendidikan agama, karena bantuan ini diperuntukkan untuk kalangan pengasuh jenjang madrasah diniyah *ula* dan *wustho*, yang secara gamblang dapat dijelaskan secara rinci, bahwa untuk tahun 2011 mencapai Rp.

²³ Madrasah Diniyah ini dikenal dengan Istilah Diniyah Takmiliyah di bagi 3 Tingkatan. Diniyah Takmiliyah Awwaliyah (DTA) Diniyah Takmiliyah Wustha (DTW) dan Diniyah Takmiliyah Ulya (DTU). Lihat Tim Penyusun, *Pedoman Penyelenggaraan Diniyah Takmiliyyah* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, 2009), 2._

5.011.200.000, tahun 2012 mencapai Rp. 3.960.000.000, tahun 2013 mencapai Rp. 2.255.400.000, dan untuk tahun 2014 mencapai Rp. 1.031.400.000.

Ketiga, bantuan untuk guru swasta, yang telah menjadi kebijakan penting pemerintah selama lima tahun. Bupati sebagai pemangku kebijakan, selalu mendorong agar nasib guru swasta bisa dipikirkan melalui penyediaan anggaran untuk kesejahteraan mereka, walaupun dengan angka yang masih terbatas. Akan tetapi, komitmen pemerintah dalam mendorong partisipasi kalangan guru swasta di wilayah Kabupaten Sumenep tetap dilakukan secara *istiqomah*, untuk tahun 2011, pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyediakan anggaran sebesar Rp. 8.206.200.000, kemudian tahun 2012 sebesar Rp. 7.075.800.000, tahun 2013 sebesar Rp. 4.044.600.000 dan tahun 2014 mencapai Rp. 1.848.600.000.

Kebijakan bantuan transport untuk guru swasta ini merupakan salah satu upaya yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk menghargai jerih payah para guru swasta, walaupun masih sebatas nominal yang sangat minim, karena setiap guru swasta (untuk sementara) hanya mendapatkan Rp. 300.000 selama 6 bulan dalam setahun. Angka tersebut memang sangat kecil apabila dibandingkan dengan pengabdian dan perjuangan para guru swasta dalam mengembangkan pendidikan di Kabupaten Sumenep secara suka cita, akan tetapi penetapan angka tersebut dilakukan karena problem keterbatasan anggaran, sehingga dalam tahun-tahun berikutnya,

jumlah bantuan tersebut harus ditingkatkan dan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masyarakat. Bantuan untuk guru swasta ini diberikan terhadap sejumlah guru yang tersebar di sejumlah satuan pendidikan swasta, baik SD, MI, SLB, SMP, M.Ts, Salafiyah Ula dan Salafiyah Wustha.²⁴

Proses penyerahan bantuan ini secara simbolis dilakukan Bupati Sumenep yang diawali dengan acara serimonial dan sambutan Bupati tepat pada tanggal 07 Februari 2013 di gedung Graha Wicaksana Abdi Negara atau gedung Korpri Sumenep. Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Guru Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) bantuan ini diberikan pada lembaga pendidikan swasta karena melihat potensi madrasah khususnya di Kabupaten Sumenep yang sangat luar biasa dalam menopang kualitas pendidikan di Kabupaten Sumenep. Oleh karena itu, komitmen pemerintah daerah akan tetap berupaya agar madrasah yang ada di Kabupaten Sumenep juga mendapatkan hak yang sama untuk bisa berkembang dan lebih maju dimasa-masa mendatang. Sampai saat ini saja ada sekitar 760 Madrasah Diniyah di seluruh Kabupaten Sumenep.

Sekarang ini, pemerintah pusat sedang mencari formulasi yang tepat agar setiap bantuan yang di alokasikan di APBD, benar-benar bermanfaat. Bahkan, dalam pembahasan APBD 2013 kemaren, sempat molor akibat terbitnya peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2012 tentang hibah daerah. Peraturan pemerintah mengatur bahwa APBD yang bentuknya hibah atau

²⁴ Bantuan untuk guru swasta juga pernah diberikan pada tahun sebelumnya oleh pemerintah daerah kabupaten sumenep, pada tahun 2011 sebesar Rp. 2.495.200.000 dan tahun 2013 sebesar Rp. 3.945.600.000, melalui pos anggaran BKPP Kab. Sumenep.

ini, setidaknya dapat memberikan tambahan penghasilan terhadap kebutuhan ekonomi keluarga, karena dalam bantuan ini, setiap guru mendapatkan jatah yang diharapkan bisa memenuhi unsur keadilan. Sehingga para GTT yang telah lama mengabdikan bisa diperhatikan kesejahteraannya secara lebih serius oleh pemerintah.

Kebijakan ini merupakan kebijakan baru yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep, karena baru dilaksanakan pada tahun 2015 keberadaan GTT kategori 2 yang selama ini dianggap tidak mendapatkan perhatian dari aspek kesejahteraan, maka dengan kebijakan insentif tersebut, secara perlahan telah mulai dirubah. Kiprah dan peran penting GTT K2 setelah bertahun-tahun mengabdikan untuk pendidikan di Kabupaten Sumenep, memang sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang cukup serius dari pemerintah. Oleh karena itu, sebagai wujud kepedulian pemerintah daerah terhadap nasib GTT K2, sejak tahun 2015, pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan dengan cara memberikan insentif terhadap kalangan GTT K2 melalui APBD sebesar Rp.4.203.000.000, yang diperuntukkan untuk 1.402 GTT K2 Kabupaten Sumenep.

kesejahteraan. Minimal ada peningkatan kesejahteraan, walaupun tidak mungkin setara dengan tingkat kesejahteraan yang di terima oleh kalangan guru PNS dan guru swasta yang bersertifikasi.

membaca menulis secara baik dan benar.³² Problem masyarakat berupa buta aksara ini terjadi hampir menyeluruh disetiap pelosok Desa dan di setiap kecamatan Kabupaten Sumenep, masyarakat yang buta aksara relatif masih sangat besar.

Setidaknya, di awal kepemimpinan Bupati Sumenep 2010-2015, jumlah buta aksara di Kabupaten Sumenep masih menunjukkan angka yang cukup memprihatinkan, karena masih mencapai 134.540 orang, yang terdiri dari 46.491 orang laki-laki dan 88,049 orang perempuan, angka itu, tentu saja menjadi problem tersendiri bagi pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Sumenep, karena dengan jumlah tersebut, bisa diasumsikan bahwa Kabupaten Semenep masih belum bebas dari problem masyarakat dengan tingkat kebutaaksaraan yang sangat tinggi dan harus di atasi tidak boleh ditunda lagi. Demi tujuan peningkatan sumber daya manusia yang dapat bersinergi dengan bangsa lain.

Untuk mengatasi problem tersebut, tak ada jalan lain bagi pemerintah daerah, kecuali melakukan perang terbuka dalam memberantas terhadap buta aksara, salah satunya dengan cara berkomitmen dalam mengurangi

³² Pemerintah Kabupaten Sumenep sangat serius membenahi masalah pendidikan, khususnya menyangkut 3 aspek utama, yakni akses pendidikan, kualitas pendidikan dan infrastruktur pendidikan. Salah satunya dengan terus meningkatkan pengelolaan pendidikan luar sekolah berupa keaksaraan fungsional. Dalam perjalanannya, program keaksaraan fungsional ternyata tidak sia-sia. Meskipun, Sumenep masih menyandang sebagai Kabupaten pemilik buta aksara nomor dua di Jawa Timur. Akan tetapi, progres dan kemajuan yang bisa didapat sudah sangat positif. Buktinya, dari tahun ke tahun jumlah buta aksara menurun secara signifikan. Jika pada tahun 2010, jumlah buta akasara di Sumenep mencapai 134.540 orang. Pada tahun 2011 menurun menjadi 124.787 orang dan pada tahun 2012 berkurang lagi menjadi 107.848 orang. Tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Sumenep menargetkan angka buta aksara turun menjadi 99.794 orang. Dan pada tahun 2015 nanti, kabupaten Sumenep diharapkan sudah bebas buta aksara. Lihat, Tim Penyusun Potret Kepemimpinan A. Busyro Karim-Soengkono Sidik, Mengawal Kemajuan Sumenep (Sumenep, TP 2013), 75.

jumlah buta aksara secara perlahan dalam setiap tahun. Bentuk komitmen yang dilakukan adalah mengusahakan melalui penyediaan anggaran daerah mengupayakan jatah anggaran dari APBD provinsi Jawa Timur semaksimal mungkin untuk program KF (keaksaraan fungsional) di Kabupaten Sumenep, yang dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai unsur dan peran serta dan dukungan berupa partisipasi masyarakat, baik kelompok belajar masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi perempuan, Lembaga swadaya masyarakat dan juga melibatkan pihak perguruan tinggi.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Sumenep untuk menciptakan kehidupan masyarakat Sumenep yang bebas buta aksara (melek huruf), mengalami perkembangan yang cukup positif, karena dengan jumlah secara perlahan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Peran dan keterlibatan masyarakat dalam program keaksaraan fungsional ini, memiliki pengaruh yang sangat penting, karena walaupun dengan anggaran yang sangat minim, usaha dan perjuangan masyarakat dari berbagai lapisan masyarakat dan berbagai organisasi kemasyarakatan dapat membantu dalam menyukseskan program pemerintah dalam mengurangi jumlah buta aksara benar-benar telah dirasakan dampaknya.

Pada tahun 2014 saja, jumlah buta aksara telah berkurang menjadi 74.744 orang, apabila dibandingkan dengan tahun 2010 masih mencapai 134.540 orang, berarti dalam jangka waktu empat tahun, komitmen dan usaha agar masyarakat bisa membaca atau melek huruf telah mengalami

berdasarkan data yang ada, memang tidak bisa dilakukan dalam waktu yang relatif singkat dengan potensi jumlah buta aksara sebagaimana tergambar dalam data tahun 2010 yang notabene masih sangat besar, yaitu mencapai 135.540 orang.

Program pemberantasan buta aksara melalui keaksaraan fungsional (KF) sebagaimana dijelaskan dalam tabel di atas, tidak serta merta menjadi akhir dari perjuangan melawan buta aksara agar masyarakat menjadi melek huruf, karena jumlah dari sisa buta aksara masih cukup tinggi dan membutuhkan komitmen tinggi untuk menuntaskannya. Dengan sisa yang ada, masih menjadi tugas bersama masyarakat dan pemerintah Kabupaten Sumenep di tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, dukungan dan partisipasi masyarakat dalam perang melawan buta aksara ini, tidak boleh pupus di tengah jalan dan berhenti begitu saja, sehingga masyarakat Sumenep yang cerdas bisa diwujudkan. Salah satu indikator paling sederhana Sumenep cerdas adalah bebas dari buta aksara, karena bebas dari buta aksara di satu sisi, telah menjelaskan kepada publik bahwa Sumenep sudah bisa keluar dari stigma sebagai Kabupaten yang masih dihantui oleh jumlah buta aksara yang cukup tinggi. Salah satu komitmen bidang pendidikan adalah Sumenep bebas buta aksara, itulah yang menjadi target untuk diwujudkan di Kabupaten Sumenep agar bisa terbebas dari buta aksara dan bisa baca tulis.

Fenomena masyarakat yang tidak bisa baca-tulis, menjadi perhatian Pemerintah daerah kabupaten Sumenep, karena mereka banyak tersebar

diberbagai pelosok desa dan hanya akan menjadi korban dari kemajuan peradaban yang maju dan terus berkembang dinamis dalam setiap waktu. Kemampuan masyarakat dalam membaca dan menulis, menjadi tuntutan dasar bagi masyarakat yang hidup di era modern saat ini. Oleh karena itu, bebas buta aksara harus dijadikan sebagai obyek perjuangan kebijakan yang tidak boleh terhenti dan bergerak mundur. Target menjadi Kabupaten yang bebas buta aksara I Sumenep, bukan hanya slogan, tetapi harus diimbangi dengan kerja keras dan kemauan yang kuat untuk menemukan jalan keluar yang realistis, yaitu penyediaan anggaran yang cukup untuk melaksanakan program pengentasan buta aksara.

Berbagai upaya yang dilakukan setiap tahun upaya itu terus dilakukan oleh pemerintah, baik melalui dana APBD kabupaten Sumenep maupun APBD tingkat I propinsi Jawa Timur, karena menjadi masyarakat bebas buta aksara memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, apabila berdasarkan data yang ada, jumlah buta aksara di Kabupaten Sumenep sangat besar, sehingga dibutuhkan tahapan waktu untuk menyelesaikannya secara efektif dan strategis dalam mengentaskan buta aksara. Secara dana pengentasan buta aksara dengan program keaksaraan fungsional (KF) lebih rinci dapat dilihat dalam tabel berikut ini;

berupa wajib belajar 9 tahun telah ditingkatkan menjadi 12 tahun harus bisa diwujudkan di Kabupaten Sumenep sebaik mungkin.³⁵

Potensi anak didik harus diasah dan dikembangkan semaksimal mungkin, melalui pengembangan pendidikan bermutu yang menyeluruh. Pengelolaan pendidikan usia dini, dasar dan menengah, tentu saja tidak bisa dirancang dengan cara pandang yang kaku dan jumud, tetapi harus dengan pemikiran dan solusi yang jelas. Anggaran memang penting dalam pengembangan pendidikan, tetapi bukan satu-satunya. Pendidikan tidak bisa hanya berharap pada ketersediaan anggaran, tanpa diimbangi dengan komitmen, kemauan yang sungguh-sungguh dan kerja keras para pengelola yang sudah diberi mandat oleh pemerintah daerah.

Sebagai pemegang otoritas kebijakan di Kabupaten Sumenep, Bupati tak henti-hentinya mendorong dan bahkan menantang semua SKPD, khususnya Dinas pendidikan untuk berbuat lebih baik dari yang telah dikerjakan sebelumnya dalam pengembangan pendidikan di Kabupaten Sumenep. Kreasi dan inovasi yang muncul, kemajuan dalam aspek apapun tidak akan tercipta dengan baik, termasuk dalam pengelolaan pendidikan yang tentu saja

³⁵ Untuk mendukung upaya pelaksanaan program wajib 9 tahun, pemerintah daerah Kabupaten Sumenep, secara konsisten melakukan berbagai cara agar program wajib ini bisa dirasakan oleh segenap anak-anak di Kabupaten Sumenep. Anak-anak Sumenep harus didorong semaksimal mungkin untuk bisa menuntaskan pendidikan 9 tahun, karena hal itu akan berdampak terhadap masa depan generasi baru masyarakat Sumenep. Oleh karena itu, guna mendukung gerakan belajar 9 tahun tersebut, pemerintah Kabupaten juga melaksanakan kegiatan pembinaan dan bantuan kesejahteraan anak yang dialokasikan untuk beberapa SD dan MI yang berada di wilayah Kabupaten Sumenep dalam bentuk pemberian bantuan seragam sekolah. Bantuan tersebut diberikan melalui Dinas Sosial Kabupaten Sumenep.

menggerakkan arah pendidikan ke arah pengembangan masyarakat yang terampil dengan skill yang memang dibutuhkan oleh masyarakat global. Karena skill atau keterampilan telah menjadi ruh masyarakat global yang tidak bisa dinafikan, sehingga pendidikan berbasis keterampilan harus dijadikan sebagai strategi menghadapi tantangan masyarakat global. Salah satunya dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asia yang akan di mulai pada 31 Desember 2015.

Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah mendorong masyarakat untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) secara merata di tengah-tengah masyarakat. SMK yang selama ini, cenderung masih berada di wilayah perkotaan, harus dikembangkan ke wilayah pelosok masyarakat memiliki akses yang mudah untuk mengembangkan putra-putri mereka di bidang kejuruan. Berbagai keahlian yang dikembangkan oleh SMK, tentu saja akan berdampak terhadap penyiapan generasi masa depan dengan keterampilan khusus yang bisa diandalkan. Minimal, setelah lulus SMK, mereka sudah memiliki keahlian dan kerampilan di bidangnya, sehingga dapat menciptakan pekerjaan secara mandiri atau dapat terjun ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan keahlian tertentu. Berdasarkan data BPS Kab. Sumenep 2013, jumlah SMK di Sumenep mencapai 31 sekolah (terdiri dari 29 SMK Swasta dan 2 SMK negeri), dengan jumlah siswa mencapai 3.952 orang siswa yang terdiri dari 2.025 siswa

SMKN dan 1.927 siswa SMK swasta.³⁹ Tentu harapan peneliti adanya SMK swasta di berbagai pelosok Desa baik wilayah daratan dan kepulauan harus memperhatikan potensi lokal sehingga dapat meningkatkan berbagai potensi yang dimiliki daerah. Namun juga harus diimbangi dengan skill yang berskala pada kebutuhan secara global. Hal ini penting karena siswa SMK perlu diperkenalkan berbagai keterampilan sederhana baik keterampilan dasar (*basic vocational based*) atau keterampilan khusus (*accpaational skill*) minimal melatih dan membiasakan bekerja dan mencintai pekerjaan.⁴⁰

Melihat prospek dan dengan mencermati konteks itu, pengembangan SMK-SMK di Kabupaten Sumenep, pada dasarnya diarahkan untuk menjawab problem sumber daya manusia masyarakat yang masih sangat terbatas, sehingga apabila tetap dibiarkan, prediksi masyarakat hanya akan menjadi tenaga kerja yang tereksplotasi dan hanya akan jadi babu di daerah sendiri tentu ini akan menjadi fakta yang berkepanjangan. Masyarakat Sumenep khususnya, sudah harus segera keluar dari jebakan itu. Manusia-manusia terampil dengan kualitas yang jelas, harus dilahirkan dari SMK-SMK yang ada, sehingga Bupati selaku pemangku kebijakan ini selalu mendorong pengelolaan dan pengembangan SMK harus selalu dilakukan dan ditingkatkan.

³⁹ Data tersebut diperoleh dari buku *Sumenep dalam angka* (Sumenep: Sumenep in figure, Badan Pusat Statistik, 2014), 116-117.

⁴⁰ Tim penyusun, *Pedoman Integrasi Pendidikan Kecakapan Hidup (life skill) dalam Pembelajaran* (Jakarta; Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 2005), 30.

masyarakat, bukan hanya pada pendidikan dasar dan menengah, tetapi juga pendidikan tinggi. Sejumlah perguruan tinggi telah didirikan oleh masyarakat, baik yang berlatar belakang pesantren maupun perguruan tinggi umum telah menjadi bagian penting dalam dinamika pembangunan masyarakat yang sangat bermakna. Terdapat beberapa perguruan tinggi yang ada di Sumenep, antara lain Universitas Wiraraja, STKIP PGRI Sumenep, INSTIKA Gukuk-guluk, IDI Al-Amin Perenduan, STIT Al-Karimiyah Beraji Gapura, STIQNIS Karang Campaka, Bluto, STITA Tarate, dan STAIM Tarate Pandian Sumenep. Bahkan ada, Akademi Komunitas Negeri Sumenep (AKNS) juga telah didirikan di Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep, sehingga masyarakat memiliki banyak pilihan dalam memilih perguruan tinggi sebagai tempat penggemblengan ilmu pengetahuan yang semakin kompetitif dengan berbagai kemajuan baik informasi dan teknologi.

Peran perguruan tinggi dalam peningkatan SDM masyarakat Sumenep di berbagai aspek sangat urgen, karena lulusan perguruan tinggi dengan latar belakang keilmuan yang vreatif dan diharapkan akan mampu memberikan alternatif, solusi dalam menyelesaikan problematika pembangunan masyarakat Sumenep⁴³ tentu semua ini butuh keseriusan dengan harus dibarengi kebulatan tekak dan dengan tujuan untuk membenahi berbagai sektor yang masih perlu ditingkatkan baik dalam

⁴³ Managemen Sumber Daya Manusia dapat memengaruhi motivasi karyawan secara langsung. Dengan cara penggunaan *performance appraisal* yang menilai kinerja individu atau kelompok kerja, mengaitkan *performance appraisal* ini secara ketat dengan sistem kompensasi dan promomosi internal yang fokus pada kepentingan karyawan. Muiz, *Manajemen*, 109.

masyarakat, potensi pencerahan akan semakin mendekati kenyataan. Apalagi, di era *knowledge based economy*, yang tidak lagi mengandalkan sumber daya alam, tetapi menekankan pada kreativitas berupa inovasi dan pengolahan sumber daya alam, tetapi eksistensi perguruan tinggi menjadi sangat urgen untuk terus dikembangkan secara merata, terutama dalam konteks lokal.

Peneliti berobsesi dengan keberadaan lembaga pendidikan tinggi yang tidak hanya mencetak lulusan yang handal dan berkualitas, perguruan tinggi juga harus memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan IPTEK yang berguna dan berhasil dengan optimalisasi daya guna, sebagai bukti kontribusi konkrit bahwa lembaga pendidikan harus dapat mencetak kadar sumber daya manusia yang juga berkapasitas dengan skala *high quality* sehingga semakin meneguhkan keberadaannya pendidikan tinggi sebagai sarana yang tepat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat.

Perkembangan keberadaan institusi perguruan tinggi tentu saja tidak bisa dilihat dengan sebelah mata, karena pendirian perguruan tinggi tersebut merupakan bagian penting dari proses pembangunan masyarakat yang seutuhnya, sehingga keberadaannya harus mendapat perhatian yang maksimal dari pemerintah. Oleh karena itu, untuk mendorong perkembangan perguruan tinggi di Kabupaten Sumenep, pemerintah terus memberikan dorongan melalui kebijakan-kebijakan yang diarahkan untuk memberikan makna terhadap pengelolaan perguruan tinggi, baik yang

terhadap siswa menuju perguruan tinggi.⁴⁸ Selain itu, pemerintah juga memperjuangkan beasiswa terhadap siswa-siswa yang berprestasi untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi bidang perminyakan. Beasiswa ini diberikan karena termotivasi oleh cita-cita untuk menyiapkan sumber daya manusia masyarakat Sumenep berkualitas yang pada akhirnya dapat menjadi investasi dalam mengelola potensi migas di kabupaten sumenep. Setidaknya, terdapat 10 orang siswa yang berasal dari sejumlah sekolah di Kabupaten Sumenep yang berhasil mendapatkan kesempatan untuk belajar di Universitas of Petroleum Yogyakarta pada tahun 2013.⁴⁹

Peningkatan mutu pendidikan adalah pemberian beasiswa 10 orang yang akan menempuh pendidikan S1 bidang migas. 10 anak itu akan menempuh pendidikan S1 dibidang migas, sehingga nanti Sumenep memiliki orang yang mampu mengelola tentang migas. Penentuan bidang kuliah yang mempelajari mengenai migas sendiri adalah hasil komitmen PT. WUS dalam membangun sumber daya manusia (SDM) Kabupaten

⁴⁸ Merespon kondisi psikologis kalangan mahasiswa dan remaja, pemerintah daerah melalui BPMP-KB Kabupaten Sumenep, melaksanakan program GenRe (Gerakan generasi berencana). Program ini memiliki keterkaitan dengan bidang kehidupan keloma dari transisi remaja, yaitu kemauan untuk mempraktekkan hidup sehat, program GenRe ini secara khusus memang ditunjukkan kepada kalangan remaja dan mahasiswa melalui wadah PIK Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) dan keluarga yang memiliki salah satu kegiatan yang dilakukan dalam program GenRe untuk memberikan informasi dan konseling pendewasaan usia perkawinan, 8 fungsi keluarga TRIAD KRR (seksualitas, HIV dan AIDS serta Napza), keterampilan hidup, gender dan keterampilan advokasi serta KEI.

⁴⁹ Beasiswa studi perguruan tinggi merupakan hasil kerjasama antara Pemkab Sumenep dengan PT Titis Sampurna dan The Universitas of Petroleum Yogyakarta. Sepuluh orang siswa tersebut terbagi ke dalam lima jurusan, yaitu jurusan perminyakan, jurusan manajemen, jurusan psikologi umum, jurusan ilmu hukum dan jurusan teknik mesin.

untuk membantu meringankan kebutuhan biaya kuliah yang menjadi problem mahasiswa kurang mampu.

Sampai saat ini, kebijakan bantuan beasiswa tersebut menjadi salah satu program pemerintah daerah dalam memperhatikan kalangan mahasiswa kurang mampu. Namun, mereka memiliki dedikasi yang tinggi dalam menempuh studi, sehingga harus mendapatkan dukungan beasiswa dari pemerintah. Apalagi, keberhasilan para mahasiswa tersebut pada gilirannya akan kembali terhadap kemajuan pendidikan di Kabupaten Sumenep. Maka, bantuan beasiswa terhadap kalangan mahasiswa tersebut pada dasarnya merupakan bagian penting dari proses membangun sumber daya manusia yang telah diberikan pemerintah Kabupaten Sumenep, misalnya untuk tahun 2014 mencapai Rp. 440.0000.000.⁵²

Penganggaran dan pengalokasian bantuan beasiswa yang diberikan dengan tujuan mengurangi beban biaya perkuliahan, karena bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu biaya perkuliahan saja yang membebani mahasiswa kurang mampu. Selain itu, beasiswa tersebut sebagai penghargaan pemerintah terhadap mahasiswa atas prestasi yang diraih oleh mahasiswa, karena salah satu kriteria untuk

⁵² Beasiswa ini diberikan pada pada mahasiswa kurang mampu, namun dirasa punya prestasi akademik 2, 75 untuk PTN dan 3.00 untuk PTS. Peruntukannya adalah mahasiswa yang kuliah lokal di Kabupaten Sumenep atau diluar Kabupaten Sumenep dengan nominal perorang 2.000.000,-.

mengesampingkan peran mahasiswa baik sebagai *agent of change* dan *agent of social control* dalam proses pembangunan Kabupaten Sumenep tentu saja sangat vital peran dan fungsinya. Sebagai *agent of change*, mahasiswa harus tampil sebagai penggerak dalam garda perubahan ketika terjadi tindakan yang menyimpang. Sebagai *agent sosial control*, eksistensi mahasiswa dalam mengawal proses pembangunan menjadi bagian penting dalam upaya menciptakan pembangunan yang bersih dan transparan. Masukan dan kritik konstruktif yang dilakukan oleh mahasiswa merupakan amunisi bagi pemerintah dalam mempercepat roda pembangunan kabupten Sumenep dengan usaha memperhatikan dan memberdayakan berbagai organiasasi kempemudaan baik organiasi kampus atau berbagai organisasi ekstra kampus yang merupakan wadah untuk mereka terus belajar agar menjadi generasi yang cakap dan tangguh.

Pandangan peneliti mahasiswa sebagai pengawal pembangunan yang gerakannya tentu tidak asal isu saja, namun berangkat dari hasil kajian ilmiah, kritis dalam menyikapi masalah atau berbagai kebijakan yang cenderung merugikan atau memberatkan masyarakat secara umum, maka dari suara hati nurani masyarakat secara umum ini dapat terwakili oleh suara mahasiswa sebagai *agent of change* dan *agent of social control* yang sebenarnya, tanpa ditunggangi siapapun, baik korporasi atau kepentingan kelompok politik sesaat yang merugikan dan dapat mengurangi perjuangan suara masyarakat dengan satu niat untuk

memberikan yang terbaik pada masyarakat terhadap proses dan pelaksanaan pembangunan.

Sebagai halnya elemen sosial lainnya, organisasi mahasiswa ekstra kampus harus tetap menjadi bagian dari proses pembangunan, sehingga pemberdayaan terhadap gerakan yang dilakukan harus mendapatkan perhatian dari pemerintah dengan tetap tidak menghilangkan independensinya sebagai mahasiswa. Pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Sumenep, tidak boleh menafikan keberadaan mahasiswa, agar proses yang dilakukan bisa dinamis, maka mahasiswa harus dilibatkan secara langsung dalam proses pembangunan, melalui pemikiran dan kajian-kajian akademik yang rasional. Pemerintah sangat membutuhkan pemikiran solutif mahasiswa dalam mengatasi setiap problem pembangunan yang terjadi. Apalagi suara mahasiswa bisa dianggap sebagai representasi kaum intelektual muda yang enerjik penuh ide kreatif yang segar, sehingga setiap masukan dan kritiknya pasti berdasarkan rasionalisasi-rasionalisasi sesuai dengan basis keilmuan yang digeluti dan menjadi konsen demi kemajuan nusa dan bangsa.

Hal ini penting untuk diperhatikan demi memberikan stimulus dalam meningkatkan potensi akademik organisasi kemahasiswaan secara umum yang ada di Kabupaten Sumenep, karena banyak organisasi punya banyak program, namun juga harus diopang dengan finansial yang agar dalam melaksanakan program kegiatan kemahasiswaan tersebut berjalan lancar, baik kegiatan akademik atau kegiatan kegiatan sosial. Sumenep

Melihat fakta dan realita hasil riset ini ada tiga tipologi temuan peneliti kebijakan pendidikan di Sumenep dalam pengambilan kebijakan pendidikan yakni:

1. *Posisi kunci*, yaitu mereka yang pihak memiliki kewenangan secara legal dan formal untuk membuat keputusan. Posisi kunci mencakup unsur eksekutif sesuai tingkatannya. Legislatif dan lembaga-lembaga pelaksana program pembangunan. Misalnya, posisi kunci untuk suatu kebijakan di bidang pendidikan di tingkat kabupaten adalah (a) pemerintah kabupaten, (b) DPRD kabupaten, dan (c) dinas pendidikan yang membawahi langsung program-program pendidikan di daerah tersebut.
2. *Posisi primer*, yaitu mereka yang memiliki relasi kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program atau proyek. Mereka biasanya dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam penyerahan aspirasi public. Stakeholder primer bisa mencakup. (a) masyarakat yang diidentifikasi akan terkena dampak (baik positif maupun negatif) oleh suatu kebijakan. (b) tokoh masyarakat dan (c) pihak manajer publik, yaitu lembaga atau badan publik yang bertanggung jawab dalam penentuan dan penerapan suatu kebijakan.
3. *Posisi sekunder*, yaitu mereka yang tidak memiliki relasi kepentingan langsung dengan suatu kebijakan, program dan proyek, memiliki kepedulian dan perhatian sehingga mereka turut bersuara dan

berupaya untuk memengaruhi keputusan legal pemerintah. Adapun yang dapat dikategorikan sebagai posisi skunder seperti: kelompok-kelompok kritis demi tujuan demi suatu kemajuan pendidikan, organisasi profesional (PGRI, KNPI dan sebagainya), LSM, organisasi sosial masyarakat (NU, Muhammadiyah)⁵⁵ dan berbagai organisasi masyarakat lainnya.

Pemangku kebijakan ketika berhubungan dengan bantuan perlu format kebijakan publik dalam bidang pendidikan dengan partisipasi aktif sektor di luar pemerintah salah satu peran aktif mahasiswa dan organisasi masyarakat. Sehingga argumentasi yang bisa dibangun bahwa pendidikan sebenarnya bisa dilakukan oleh dukungan dan kontrol masyarakat, karena pemerintah menganggap bahwa pendidikan merupakan kegiatan strategis bagi perkembangan sebuah negara karena penentu kualitas sebuah bangsa terletak pada tingkat pendidikan yang dicapai penduduknya. Kebijakan publik bidang pendidikan dapat bisa sebagai keputusan yang diambil bersama antara pemerintah dan aktor di luar pemerintah dan mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhinya untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan pada bidang pendidikan bagi seluruh warga masyarakat secara umum.

⁵⁵ Apabila ditelusuri lebih secara mendalam, intervensi politik juga datang dari organisasi-organisasi sosial keagamaan, seperti NU dan Muhammadiyah. Kedua organisasi ini memasukkan dan atau menambahkan mata pelajaran Aswaja. Penambahan mata pelajaran ini menambah beban pada yang harus dikuasai siswa semestinya siswa bisa memfokuskan pada pelajaran inti. Dengan penambahan itu, konsentrasi mereka menjadi terbelah. Di samping itu misalnya Ma'rifat NU juga mengadakan tujuan sendiri di lingkungan sekolah dan madrasah yang makin memberatkan siswa, padahal hasil ujian itu tidak memiliki pengaruh apapun. Lihat Qamar. *Kesadaran*. 92.

Implementasi kebijaksanaan pendidikan yang tentunya berupaya dalam peningkatan kualitas pendidikan, diperlukan juga beberapa kondisi, antara lain:

1. Adanya komitmen politik kebijakan pada perencanaan pendidikan.
2. Perencanaan pendidikan harus tahu betul apa yang menjadi hak, tugas, dan tanggung jawab.
3. Harus ada perbedaan yang tegas, antara area politis, teknis, dan administratif pada perencanaan pendidikan.
4. Perhatian lebih besar diberikan pada penyebaran kekuasaan untuk membuat keputusan politis dan teknis.
5. Perhatian lebih besar diberikan pada pengembangan kebijakan dan prioritas pendidikan yang terarah.
6. Mengurangi politisasi pengetahuan.
7. Harus berusaha lebih besar untuk mengetahui opini publik terhadap perkembangan masa depan dan arah pendidikan.
8. Administrator pendidikan harus lebih aktif mendorong perubahan dalam perencanaan pendidikan.
9. Ketika pemerintah tidak menguasai lagi semua aspek pendidikan, maka harus lebih diupayakan kerja sama yang saling menguntungkan antara pemerintah swasta perguruan tinggi yang sebagai pemangku kebijakan yang memegang otoritas pendidikan.

Akhirnya, dalam upaya meningkatkan peranan kualitas pendidikan ke depan, akuntabilitas dan kemandirian perguruan tinggi merupakan suatu keharusan. Oleh karenanya, para penyelenggara pendidikan tinggi sekarang perlu melakukan introspeksi dan retrospeksi sejauhmana hal tersebut sudah dilakukan. Perguruan tinggi yang memperhatikan akuntabilitas sudah pasti akan melibatkan partisipasi masyarakat, dan dalam hal ini tidak saja dalam bentuk pengelolaan, tetapi juga program-program yang dikembangkan perguruan tinggi harus menyatuhi atau punya relevansi dengan berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya.

Temuan berbagai posisi di atas dalam kebijakan bidang pendidikan dipergunakan untuk memberikan dampak dan menunjukkan perilaku seorang aktor, baik seorang pejabat, suatu kelompok atau lembaga pemerintah dalam suatu bidang kegiatan tertentu, adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Apa yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sumenep cukup tepat dengan melakukan reformasi birokrasi dan memberikan dampak pada peningkatan pelayanan publik. Pemahaman ini juga masih memberikan nuansa yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Kondisi itu merupakan hal yang utama dalam mendukung terwujudnya kebijakan pendidikan

yang benar-benar adil dan demokratis dan bisa mengamodirsemua pihak.

Intinya kebijakan pendidikan merupakan sebuah upaya konkrit yang sungguh-sungguh, yang dilakukan seorang pemimpin sebagai pemangku kebijakan dengan menggunakan segala potensi yang dimilikinya, dengan akal sehat dan pertimbangan matang yang ditujukan untuk memenuhi keperluan masyarakat, agar kesejahteraan sosial (*social welfare*) tercapai, yaitu; menciptakan lapangan kerja, mengakumulasi aset produktif, dan merintis serta mengembangkan usaha kecil dan menengah. Hal ini bisa tercapai dalam sebuah sinergitas yang baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat yang bergerak dalam mewujudkan program-program pembangunan untuk Kabupaten Sumenep.